

BAB II

BRICS DALAM POLITIK INTERNASIONAL

Pada bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum organisasi BRICS secara menyeluruh. Pembahasan didalamnya mencakup sejarah kemunculan BRICS, bagaimana perkembangan dan eksistensinya sebagai organisasi internasional, dan seperti apa posisinya dalam panggung internasional, serta menganalisis terhadap kekuatan dan kelemahan organisasi tersebut. Dalam panggung internasional, aliansi memiliki peran sebagai sarana negara untuk menggabungkan sumber daya yang ada yang nantinya digunakan untuk memberikan rasa aman dalam menanggapi ancaman eksternal (Hopmann P. Terrence, 2020). Dalam rangka tersebut, keikutsertaan suatu negara dalam aliansi multilateral merupakan pilihan strategis yang rasional, mengingat jika negara berdiri sendiri memiliki keterbatasan kekuatan dalam menghadapi tekanan maupun dinamika internasional yang semakin kompleks. Di tengah kompleksitas dinamika internasional tersebut, BRICS hadir sebagai aliansi yang mencerminkan aspirasi negara-negara berkembang untuk berkontribusi lebih besar dalam membentuk tatanan global yang lebih adil dan seimbang.

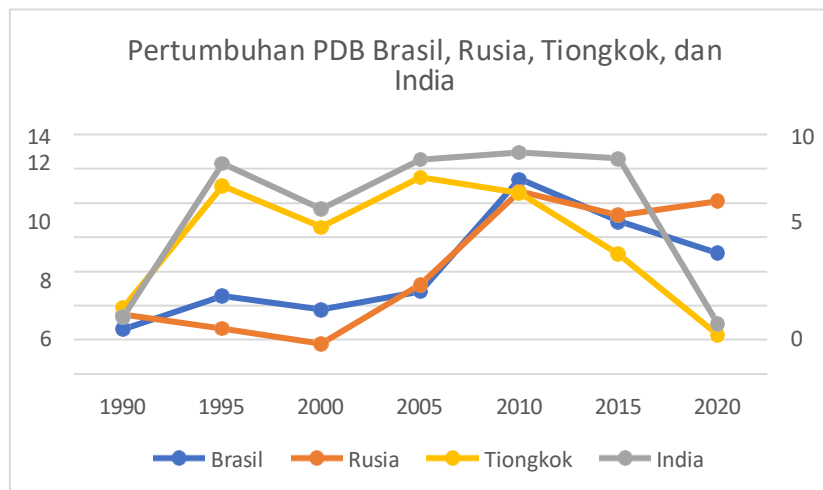
2.1. Sejarah dan Perkembangan BRICS

Sebelum adanya BRICS, sebenarnya sudah terdapat konsep ala BRICS antara tahun 1996 dan 1998 di Kementerian Luar Negeri Rusia. Hal ini terjadi karena adanya keinginan Rusia untuk mengurangi ketergantungan dari negara

Barat (BRICS Expert Council, 2026). Kondisi tersebut, Rusia bersama Tiongkok melakukan jalinan kerja sama yakni Declaration on Multipolar World and The Establishment of New International Order pada 23 April 1997. Deklarasi ini memiliki tujuan yang tertuang dalam dokumen resmi yang pada intinya untuk mengembangkan kemitraan yang strategis dengan mengutamakan kesetaraan dan keadilan sehingga terciptanya tatanan dunia yang multipolar dalam politik internasional (ILM,1997). Bagi Rusia dan Tiongkok, tatanan dunia multipolar akan memberikan kemudahan bagi banyak negara untuk dapat berkontribusi dalam membuat dan melaksanakan kebijakan dalam tatanan politik internasional.

Dalam perkembangannya, pada akhir tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an, muncul gagasan untuk menyatukan Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok dalam satu kelompok kerja sama. Keempat negara tersebut dipandang sebagai pusat ekonomi yang kuat dengan pertumbuhan PDB yang pesat dan pengaruh global yang signifikan(TV BRICS, 2025). Berikut data pertumbuhan PDB negara Brazil, Rusia, Tiongkok dan India periode tahun 1990 sampai 2020 :

Gambar 2.1 Data Pertumbuhan PDB Brazil, Rusia, Tiongkok, dan India Periode 1990 – 2020



Sumber : World Bank Data (2026)

Berdasarkan data diatas, bahwa perkembangan PDB keempat negara tersebut sedang mengalami pertumbuhan yang baik. Kondisi tersebut memunculkan sebuah optimisme kolektif terhadap kekuatan ekonomi baru di pasar global. Akronim BRIC pun dicetuskan pada tahun 2001 oleh seorang ekonom dari bank investasi Goldman Sachs, Jim O' Neill, sebagai pengakuan atas pertumbuhan ekonomi yang dinamis dari Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok (BRICS Brazil, 2025).

Secara resmi, titik awal utama terbentuknya BRIC adalah September 2006, atas usulan Presiden Rusia Vladimir Putin, pertemuan pertama para menteri luar negeri keempat negara tersebut berlangsung (TV BRICS, 2025). Selanjutnya, Rusia menjadi tuan rumah KTT BRIC resmi pertama pada tahun 2009 yang dihadiri empat negara pendiri yakni Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok. Pada tahun berikutnya, Afrika Selatan resmi bergabung pada tahun 2010 atas undangan Tiongkok, sehingga akronim kelompok ini berubah dari BRIC menjadi BRICS

(Ferragamo, 2025). Bergabungnya Afrika Selatan menandai perluasan pertama keanggotaan BRICS, sekaligus memperluas representasi geografis forum ini ke benua Afrika.

Visi dan misi dari BRICS adalah menghimpun suara yang lebih besar bagi negara-negara berkembang dalam urusan dunia, sebagaimana yang dirujuk oleh Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, pada pertemuan puncak baru-baru ini ketika mengenang Konferensi Bandung tahun 1955 (Niu, 2023). Melalui pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentunya menjadi ajang unjuk gigi BRICS agar dapat menarik negara-negara berkembang untuk menjadi anggota mitranya atau anggota tetap. Dalam KTT BRICS yang diselenggarakan pada 22-24 Agustus 2023, di Afrika Selatan, bahwa ekspansi BRICS akan berjalan dengan mulus dengan mengundang perwakilan dari puluhan negara lain untuk menghadiri pertemuan di Johannesburg (Maulana Firmansyah et al., 2024).

Dalam merekrut anggota baru, BRICS menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Setiap negara yang ingin bergabung wajib menyampaikan surat *expression of interest* kepada negara yang sedang memegang presidensi BRICS (Setuningsih, 2025). Setelah surat diterima, para anggota BRICS kemudian melakukan perundingan internal untuk membahas kelayakan negara pemohon, dan keputusan diterima atau tidaknya diambil secara konsensus oleh seluruh anggota bukan oleh presidensi semata. Apabila seluruh anggota telah menyepakati, negara presidensi yang sedang menjabat akan mengumumkan keputusan tersebut secara resmi (Hermawan, 2025).

Sejak saat itu, BRICS mengalami perkembangan keanggotaan yang

signifikan terjadi pada tahun 2023 ketika KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan, mengumumkan penambahan enam negara baru yakni Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, Mesir, Ethiopia, dan Argentina serta empat negara lainnya resmi bergabung pada tahun 2024, dan Indonesia kemudian resmi diterima sebagai anggota penuh ke-10 pada 6 Januari 2025 (Halim, R & Can, E, 2025).

Sebagai forum kerja sama yang fleksibel, dalam keanggotaan BRICS memiliki dua kategori yakni keanggotaan penuh dan keanggotaan mitra. Dua keanggotaan tersebut turut mengikuti serangkaian kegiatan BRICS. Untuk negara keanggotaan penuh memiliki hak partisipasi penuh dan pengambilan keputusan yang berbasis konsesus (keepakatan bersama), sedangkan negara dengan keanggotaan mitra umumnya diundang untuk berpartisipasi dalam KTT Kanselir dan Pemimpin BRICS, namun mereka juga dapat hadir dalam pertemuan lain jika ada konsensus di antara para anggota (BRICS Brasil, 2025). Untuk saat ini, perkembangan negara dengan keanggotaan penuh sebanyak 11 negara diantaranya :

Tabel 2.1 Perkembangan Keanggotaan BRICS

No	Negara	Tanggal Bergabung
1.	Rusia	16 Juni 2009
2.	Tiongkok	16 Juni 2009
3.	India	16 Juni 2009
4.	Brasil	16 Juni 2009
5.	Afrika Selatan	24 Desember 2010
6.	Mesir	1 Januari 2024
7.	Ethiopia	1 Januari 2024
8.	Iran	1 Januari 2024
9.	Uni Emirat Arab	1 Januari 2024
10.	Arab Saudi	1 Januari 2024
11.	Indonesia	6 Januari 2025

Sumber : Diolah oleh penulis sendiri dari berbagai sumber (2026)

Dalam keanggotaan BRICS memiliki dua jenis keanggotaan yakni keanggotaan penuh dan mitra. Perbedaan dari keduanya adalah dengan keanggotaan penuh, keanggotaan mitra ini memiliki peran yang sifatnya kolaboratif dan tidak "kaku" karena keterlibatannya lebih fleksibel dan tidak ada beban tanggung jawab seperti anggota penuh (Anjellina., et al, 2024). Adapun negara-negara yang telah bergabung sebagai anggota mitra BRICS pun cukup beragam. Negara yang memiliki status sebagai kelompok mitra diantaranya Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Uganda, Uzbekistan, Nigeria, dan Vietnam (BRICS Today, 2025).

2.2. BRICS sebagai Forum Kerja Sama Antar-Pemerintah

Dalam tatanan politik internasional, BRICS memiliki peran yang sangat penting sebagai forum kerja sama antar-pemerintah yang bersifat informal, namun sangat berpengaruh. BRICS bukan sebagai organisasi internasional, melainkan forum kerja sama antar-perintah karena BRICS tidak memiliki kantor sekretariat yang tetap, tidak memiliki perjanjian konstitutif, dan dana bersama seperti organisasi internasional (BRICS Brasil, 2025). Sebagai forum kerja sama antar pemerintah, BRICS menjalankan mekanisme kerjanya melalui serangkaian pertemuan secara bertahap yang melibatkan berbagai pihak, mulai Sherpa, menteri yang terlibat hingga kepala negara. Dalam pelaksanaannya, BRICS menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) setiap satu tahun sekali dengan sistem presidensi bergilir dengan antar negara anggota sekaligus menjadi

tuan rumah (Ferragamo, 2025). Dengan kata lain, negara anggota yang memiliki jabatan presiden BRICS akan menjadi tuan rumah KTT sekaligus menjadi penentu agenda KTT.

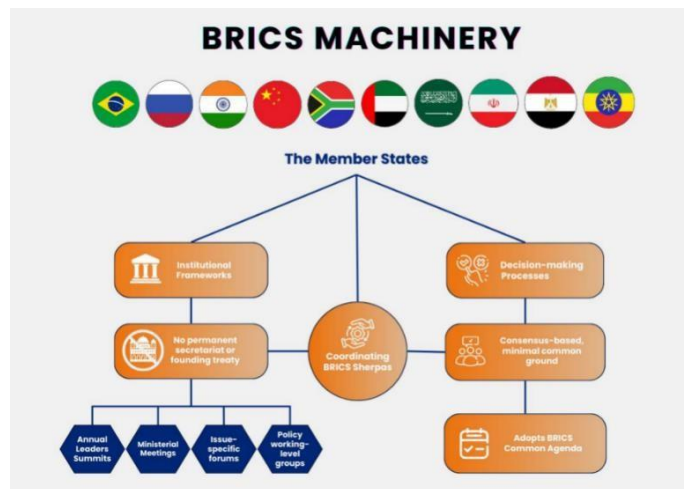
KTT BRICS dihadiri oleh para kepala negara dan menteri luar negeri, sementara Sherpa berperan dalam mempersiapkan agenda dan memastikan kelancaran penyelenggaraan KTT. Sherpa BRICS adalah pejabat pemerintah tingkat tinggi yang ditunjuk oleh masing-masing negara anggota BRICS untuk mewakili negara mereka. Umumnya, Sherpa adalah pejabat pemerintah tingkat tinggi atau seorang diplomat yang mewakili dalam memainkan peran penting menyusun agenda, menegosiasikan hasil, serta membangun konsensus di antara negara-negara anggota mengenai berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama (BRICS Sherpa, 2024). Dengan begitu, setiap tahun dalam penyelenggaraan KTT BRICS memiliki tema dan prioritas yang berbeda dan berkesinambungan. Berikut summitry timeline KTT BRICS pada setiap tahunnya :

Gambar 2.2 *Summitry Timeline BRICS*

Sumber : *Institute for Security and Development Policy Background BRICS (2024)*

Pada gambar diatas, terlihat bahwa dalam bahasan atau agenda yang dibahas disetiap tahunnya berbeda dan berkesinambungan. Selain itu, kelembagaan BRICS merupakan forum kerja sama antar negara yang memiliki kelembagaan yang fleksibel tanpa sekretariat yang permanen maupun perjanjian pendiri yang resmi, menempatkan negara anggota sebagai aktor utama yang berdaulat, dengan koordinasi melalui perwakilan Sherpa, pelaksanaan kerja sama melalui berbagai pertemuan multilevel, serta pengambilan keputusan berbasis kesepakatan bersama. Berikut bagan alur kelembagaan BRICS :

Gambar 2.3 Bagan Kelembagaan BRICS



Sumber : Institute for Security and Development Policy Background BRICS (2026)

Pada gambar 2.3, pertemuan antar anggota BRICS tidak hanya saat KTT saja. Sebelum terlaksananya KTT, terdapat pertemuan antar menteri negara anggota BRICS, mulai dari negara anggota penuh dan mitra. Hal ini dibuktikan saat pertemuan menteri luar negeri atau foreign minister meeting (FMM) dengan BRICS, yakni Bapak Sugiyono, selaku Menlu RI, menghadiri pertemuan tersebut pada tahun 2025. Dalam pertemuan tersebut tentu sangat penting dilakukan karena nantinya akan kerangka acuan dalam KTT BRICS selanjutnya (Wiryono & Ramadhan, 2025). Artinya, pertemuan antarmenteri pada anggota BRICS merupakan pertemuan yang sangat krusial karena sebelum diselenggarakan KTT, perlu adanya bahasan secara tajam agar KTT terarah dan menghasilkan keputusan yang strategis.

Pada prinsipnya, BRICS merupakan forum kerja sama antar negara yang memiliki prinsip yakni kesetaraan kedaulatan, non-intervensi dalam kerja sama,

dan mendukung tatanan global yang multilateral (Institute for Security and Development Policy, 2024). Kondisi ini terjadi karena negara selatan merasa dirugikan atas ketidakadilan sistem unipolar sehingga menyebabkan negara selatan banyak yang mengalami ketidakstabilan dalam pembangunan sumber daya didalamnya. Dengan begitu, bisa dilihat bahwa negara yang tergabung BRICS adalah negara berkembang dan memiliki indikator pada indeks inklusivitas yang relatif rendah (Bahturidze et al, 2024). Melalui BRICS, prinsip yang terlihat mengenai kesetaraan dan mendukung tatanan dunia multipolar, serta memberikan keadilan bagi negara selatan untuk bisa berkembang dan berkontribusi dalam tatanan global internasional. Selain itu, BRICS memiliki prinsip untuk tidak mengikuti blok mana pun. Hal ini ditandai pernyataan dari Presiden Brasil yakni bahwa BRICS merupakan warisan Gerakan Non-Blok yang dihasilkan dari KAA Bandung pada tahun 1955 (Deutsch Welle, 2025).

Ketimpangan pembangunan ekonomi global yang masih dialami oleh negara-negara berkembang mendorong munculnya upaya kolektif untuk menciptakan sistem ekonomi alternatif di luar dominasi institusi keuangan global tradisional. Respons tersebut kemudian diwujudkan melalui pembentukan lembaga dengan mekanisme keuangan alternatif yang berbeda dari institusi keuangan global tradisional seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, yakni mekanisme keuangan yang diinisiasi oleh BRICS melalui pendirian New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA).

New Development Bank (NDB) merupakan bank pembangunan multilateral yang didirikan pada tahun 2014 oleh negara-negara BRICS (Brasil,

Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) sebagai bentuk respon untuk mempengaruhi tatanan keuangan global (Hofman & Srinivas, 2024). Dalam mekanismenya, NDB sebagai lembaga keuangan yang dibentuk dan diarahkan oleh pemerintah nasional untuk menyalurkan pinjaman guna memenuhi tujuan dari negara peminjam (Gong et al., 2023). Dengan kata lain peminjamannya memiliki sifat jangka panjang untuk pembangunan negara peminjam. Berbeda halnya dengan CRA (Contingent Reserve Arrangement) yang mana merupakan sistem dana cadangan dengan sumber dana dari negara anggota BRICS. Sumber dana yang ada di CRA ini adalah negara anggota BRICS yang memiliki komitmen untuk menyediakan cadangan devisa internasional sebesar USD 100 miliar. Melalui kontribusi tersebut, negara inti BRICS yakni Tiongkok memberikan kontribusi sebanyak USD 41 miliar sedangkan Brasil, India, dan Rusia masing-masing berkontribusi sebanyak USD 18 miliar, dan Afrika Selatan sebanyak USD 5 miliar (BRICS Brasil, 2025). Secara sederhana, CRA merupakan lembaga yang akan menjadi penolong negara anggota saat krisis (sifatnya jangka pendek). CRA bertujuan untuk membantu negara-negara anggota BRICS yang menghadapi kesulitan dalam memperoleh mata uang asing untuk pembayaran internasional mereka, memungkinkan mereka untuk mengambil dana sehingga dari dana ini untuk menutupi kekurangan mata uang mereka (Toussian, 2025).

2.3. Posisi BRICS dalam Tatanan Politik Internasional Multipolar

Kondisi tatanan politik saat ini berakibat dari pasca berakhirnya Perang Dingin. Saat Perang Dingin terjadi, Amerika Serikat mendominasi tatanan global

sebagai kekuatan tunggal (unipolar), namun dominasi tersebut kini mulai menurun karena munculnya kekuatan baru dari berbagai kawasan, salah satunya kawasan Selatan atau global south. Global south merupakan sebutan kawasan geopolitik yang memiliki citra sebagai kawasan negara berkembang. Dengan kata lain, istilah global south ini adalah negara-negara yang secara ekonomi kurang beruntung saat pasca Perang Dingin (Mahler, 2024). Kondisi seperti ini memberikan ketidakadilan bagi negara yang terdampak buruk dari Perang Dingin sehingga memunculkan pergeseran tatanan dunia politik yang awalnya unipolar menjadi multipolar. Kondisi unipolar ini tidak memberikan ruang bagi negara selatan untuk bisa berkontribusi kebijakan di kancah internasional karena didominasi oleh hegemoni Amerika Serikat dan negara Barat. Hal ini ditandai adanya ketimpangan distribusi kekuasaan (Partida, 2025). Adanya ketimpangan ini memunculkan beberapa kelompok dari global south untuk bisa keluar dari kondisi tersebut salah satunya BRICS.

BRICS hadir sebagai kelompok yang merepresentasikan solidaritas selatan karena sejalan dengan semangat Konferensi Bandung, konferensi Asia-Afrika berskala besar pertama pada tahun 1955, yang menekankan pembangunan ekonomi dan non-blok politik yang dianggap penting untuk pertumbuhan dan stabilitas, di mana negara-negara berkembang tidak akan terjebak dalam mendukung satu kekuatan di atas kekuatan lainnya (Naidu, S., 2011). Selain itu, dengan hadirnya BRICS memberikan dorongan bagi negara selatan untuk bisa berkontribusi dalam sistem internasional yang sifatnya multipolar dan inklusif.

Kondisi multipolar ini memberikan dorongan BRICS untuk mereformasi

tatanan sistem keuangan global. Sejak Perang Dunia 2, tatanan ekonomi politik internasional mengalami krisis diberbagai negara, tidak hanya negara yang menjadi tokoh utama dalam perang ini, tetapi negara sekitarnya juga terkena imbasnya. Untuk menanggulangi kejadian tersebut maka tugas tokoh kunci ahli ekonomi yakni Harry Dexter White (delegasi Departemen Keuangan Amerika Serikat di bawah Menteri Henry Morgenthau) dan John Maynard Keynes (Ekonom Inggris) membangun sistem Bretton Woods (Bretton Woods Project, 2019). Bersamaan saat itu, memunculkan lembaga keuangan yakni IMF dan World Bank. Adanya dua lembaga tersebut untuk membantu negara-negara yang terdampak Perang Dunia 2 dari segi ekonomi. Akan tetapi memberikan dampak yang kurang baik karena dinilai memberikan pengaruh buruk terhadap pinjaman kepada negara berkembang. Dampak kurang baik bagi negara selatan karena terdapat persyaratan salah satunya adanya intervensi mengenai sistem keuangan dalam negeri bagi negara peminjam yang harus sesuai dengan kedua lembaga tersebut. Penyesuaian struktural merepresentasikan bentuk intervensi ekonomi tidak langsung, di mana lembaga keuangan internasional memengaruhi kebijakan domestik negara peminjam melalui persyaratan reformasi ekonomi sebagai prasyarat pemberian pinjaman (Karjanen, D., 2015). Kondisi tersebut secara tidak langsung melanggengkan kekuatan dollar bahwa pusat kegiatan ekonomi adalah mata uang tersebut. Sistem Bretton Woods menciptakan ketidakseimbangan ekonomi global karena hanya Amerika Serikat yang memiliki akses bebas untuk menukarkan dolar dengan emas (Rahimova, 2023).

Kondisi multipolar ini memberikan dorongan BRICS untuk mereformasi

tatanan sistem keuangan global. Sejak Perang Dunia 2, tatanan ekonomi politik internasional mengalami krisis diberbagai negara, tidak hanya negara yang menjadi tokoh utama dalam perang ini, tetapi negara sekitarnya juga terkena imbasnya. Untuk menanggulangi kejadian tersebut maka tugas tokoh kunci ahli ekonomi yakni Harry Dexter White (delegasi Departemen Keuangan Amerika Serikat di bawah Menteri Henry Morgenthau) dan John Maynard Keynes (Ekonom Inggris) membangun sistem Bretton Woods (Bretton Woods Project, 2019). Bersamaan saat itu, memunculkan lembaga keuangan yakni IMF dan World Bank. Adanya dua lembaga tersebut untuk membantu negara-negara yang terdampak Perang Dunia 2 dari segi ekonomi. Akan tetapi memberikan dampak yang kurang baik karena dinilai memberikan pengaruh buruk terhadap pinjaman kepada negara berkembang. Dampak kurang baik bagi negara selatan karena terdapat persyaratan salah satunya adanya intervensi mengenai sistem keuangan dalam negeri bagi negara peminjam yang harus sesuai dengan kedua lembaga tersebut. Penyesuaian struktural merepresentasikan bentuk intervensi ekonomi tidak langsung, di mana lembaga keuangan internasional memengaruhi kebijakan domestik negara peminjam melalui persyaratan reformasi ekonomi sebagai prasyarat pemberian pinjaman (Karjanen, D., 2015). Kondisi tersebut secara tidak langsung melanggengkan kekuatan dollar bahwa pusat kegiatan ekonomi adalah mata uang tersebut. Sistem Bretton Woods menciptakan ketidakseimbangan ekonomi global karena hanya Amerika Serikat yang memiliki akses bebas untuk menukarkan dolar dengan emas (Rahimova, 2023). Dominasi dolar Amerika Serikat menimbulkan kerugian bagi sistem keuangan dalam negeri bagi negara

lain. Kondisi tersebut memunculkan upaya dedolarisasi dan reformasi sistem keuangan global karena dominasinya dolar Amerika Serikat menyebabkan negara di berbagai kawasan menjadi buruk sistem ekonomi domestiknya. Urgensi perubahan tersebut mendorong negara-negara anggota BRICS untuk menciptakan mata uang alternatif sebagai langkah dedolarisasi strategis yang bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi dari risiko geopolitik dan mewujudkan sistem keuangan global yang lebih multipolar dan berimbang (Gedikli et al., 2025). Hal ini menjadikan BRICS sebagai penyeimbang dominasi Amerika Serikat dan Barat dalam sistem politik ekonomi global. Inisiatif ini menjadi bukti nyata transformasi BRICS sebagai poros utama penyeimbang dominasi Barat, yang berupaya meruntuhkan struktur keuangan hegemonik demi stabilitas ekonomi negara-negara berkembang di masa depan.

2.4. Peran dan Tantangan BRICS di Panggung Global

Dalam perkembangannya, BRICS merupakan salah satu kelompok kerja sama yang memiliki peran strategis sekaligus memiliki tantangan tersendiri dalam upayanya mewujudkan tatanan dunia yang multipolar dan berkeadilan. Sesuai dengan tujuan dan prinsipnya, BRICS dapat mendorong negara-negara berkembang untuk berintegrasi dan menantang sistem tata kelola politik global (Arapova, 2019). Hal ini tentunya mendorong multipolaritas pada tatanan politik internasional sehingga dapat memperjuangkan kepentingan negara berkembang. Sistem multipolar tidak berpusat hanya 1 atau 2 negara saja yang dapat berkontribusi dalam panggung internasional. Melalui BRICS kerja sama yang terjalin tidak hanya

mendorong pembangunan bersama tetapi juga memberikan kesempatan kerja sama Selatan-Selatan sehingga dapat menjaga hegemonik multipolaritas (Mohamad Zreik, 2024).

Dalam keberjalanannya, BRICS juga memiliki peran dalam pengelolaan keuangan global. Bisa dikatakan, sistem keuangan global sebelumnya memberikan efek ketidakstabilan ekonomi domestik negara selatan. Dengan begitu, melalui BRICS, institusi-institusi yang telah dibentuk seperti NDB dan CRA, memiliki peran untuk menciptakan sistem keuangan alternatif yang lebih independen dari dominasi Barat. Hal ini tentu menciptakan gambaran bahwa adanya pergeseran kekuatan ekonomi dan politik ke negara berkembang (Suchodolski & Demeulemeester, 2018). Kondisi seperti ini tentu menggambarkan bahwa BRICS sangat berperan memberikan suara bagi negara berkembang untuk dapat memperjuangkan kepentingannya, terutama dalam hal pembangunan ekonomi yang mandiri.

BRICS dalam memainkan perannya di panggung internasional tentu menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga solidaritas dan eksistensinya. Menjaga stabilitas forum kerja sama ini sangat kompleks karena tantangan yang dihadapi mencakup dimensi internal maupun eksternal. Salah satu tantangan internal utama adalah perbedaan kepentingan antar anggota, khususnya konflik perbatasan antara Tiongkok dan India. BRICS menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh berbagai kepentingan nasional yang terkadang saling bertentangan; kekhususan hubungan yang dipertahankan oleh beberapa negara anggota dengan Barat, persaingan antara beberapa negara anggota dan negara

tetangganya (Rusia vs Ukraina, Tiongkok vs Taiwan, Mesir vs Ethiopia, India vs Pakistan, dan konflik Tigray di Ethiopia), dan sikap yang tampaknya bermusuhan dari Rusia dan Iran terhadap Barat, dan Iran terhadap Israel (Kiyala, 2025). Hal ini tidak dapat diselesaikan dalam kerangka BRICS karena forum ini tidak memiliki mekanisme penyelesaian sengketa bilateral yang formal. Dengan begitu kondisi ini sejalan dengan karakter BRICS yang bukan organisasi internasional, di mana tindakan kelompok merupakan urusan bilateral sehingga jika ingin diselesaikan harus sesuai kesepakatan bersama dan sifatnya sukarela (Brosig, 2024).

BRICS dalam memainkan perannya di panggung internasional tentu menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga solidaritas dan eksistensinya. Menjaga stabilitas forum kerja sama ini sangat kompleks karena tantangan yang dihadapi mencakup dimensi internal maupun eksternal. Salah satu tantangan internal utama adalah perbedaan kepentingan antar anggota, khususnya konflik perbatasan antara Tiongkok dan India. BRICS menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh berbagai kepentingan nasional yang terkadang saling bertentangan; kekhususan hubungan yang dipertahankan oleh beberapa negara anggota dengan Barat, persaingan antara beberapa negara anggota dan negara tetangganya (Rusia vs Ukraina, Tiongkok vs Taiwan, Mesir vs Ethiopia, India vs Pakistan, dan konflik Tigray di Ethiopia), dan sikap yang tampaknya bermusuhan dari Rusia dan Iran terhadap Barat, dan Iran terhadap Israel (Kiyala, 2025). Hal ini tidak dapat diselesaikan dalam kerangka BRICS karena forum ini tidak memiliki mekanisme penyelesaian sengketa bilateral yang formal. Dengan begitu kondisi ini sejalan dengan karakter BRICS yang bukan organisasi internasional, di mana

tindakan kelompok merupakan urusan bilateral sehingga jika ingin diselesaikan harus sesuai kesepakatan bersama dan sifatnya sukarela (Brosig, 2024). Tantangan eksternal yang dihadapi yakni adanya upaya dedolarisasi BRICS yang tentu mendapat respons keras dari Amerika Serikat. Presiden Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif sebesar 100% terhadap negara-negara BRICS yang melakukan dedolarisasi atau menciptakan mata uang alternatif pengganti dolar AS dalam perdagangan internasional (Mahdi, 2025). Ancaman ini tentu akan menambah komplikasi lebih lanjut pada upaya kerja sama keuangan BRICS, sekaligus menempatkan negara-negara anggota pada posisi dilematis antara mempertahankan solidaritas BRICS dan menjaga hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat.